

**PENGARUH INDEPENDENSI, MEKANISME CORPORATE GOOD
GOVERNANCE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN KOMISIRIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING**

Erpin Oktapiyana,¹⁾ Patricia Dhiana P.²⁾ Marsiska Ariesta Putri³⁾

- ¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Pandanan Semarang ²⁾³⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis Universitas Pandanan Semarang

Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan *Chief Executive Officer* (CEO), komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal auditor salah satunya dialami oleh Enron, cukup membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam. Terungkapnya skandal-skandal sejenis ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan, yang salah satunya ditandai dengan turunya harga saham secara drastis dari perusahaan yang terkena kasus.

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang-orang, peristiwa dan hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sekaran, 2000) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sampai 2013, berjumlah 105 dengan tujuan mengetahui trend perkembangan integritas laporan keuangan pada tahun terbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dikarenakan sampel pada Perbankan sudah mempunyai kriteria yang ditentukan Bursa Efek Indonesia sehingga dipergunakan semua untuk penelitian. Jumlah sampel penelitian 35 perusahaan bank dengan Kriteria.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Mekanisme Good Corporate Governace* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kualitas Audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata Kunci : Independensi, Mekanisme Good Corporate Governace, Kualitas Audit, integritas laporan keuangan, Komisaris Independensi

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan manipulasi akuntansi. Skandal

manipulasi akuntansi ini melibatkan sejumlah perusahaan besar di Amerika seperti Enron, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa perusahaan

besar di Indonesia seperti Kimia Farma dan Bank Lippo yang dahulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi. Susiana dan Arleen Herawaty (2010). Kasus seperti ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan *Chief Executive Officer* (CEO), komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal auditor salah satunya dialami oleh Enron, cukup membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam. Terungkapnya skandal-skandal sejenis ini menyebabkan merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat keuangan, yang salah satunya ditandai dengan turunya harga saham secara drastis dari perusahaan yang terkena kasus. Timbulnya kasus-kasus serupa menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan dan pola kepemilikan yang terdistribusi luas atau yang lebih dikenal dengan *corporate good governance* yang baik belum diterapkan. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan atau pihak manajemen untuk mengeluarkan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu guna menghindari terpuruknya harga saham. Selain dari pihak perusahaan, eksternal auditor juga harus turut bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti ini. Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang

handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor memerlukan kepercayaan terhadap kualitas jasa yang diberikan pada pengguna. Penting bagi pemakai laporan keuangan untuk memandang Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak yang independen dan kompeten, karena akan mempengaruhi berharga atau tidaknya jasa yang berguna dan berharga, maka nilai audit atau kualitas audit juga meningkat, sehingga KAP dituntut untuk bertindak dengan profesionalisme tinggi. Penelitian yang dilakukan Mayangsari (2013) dengan judul “ Pengaruh Independensi, Mekanisme *corporate good governance* dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan yang diukur dengan indeks keservatisme dengan variabel Independen diprosikan dengan spektrum jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan lamanya hubungan Auditor, mekanisme *corporate good governance* diprosikan dengan persentase manajerial, komite audit dan komisaris independen, kualitas audit diprosikan dengan spesialisasi auditor dengan menggunakan sampel dan populasi perusahaan publik periode 2008 – 2012. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan negatif antara komite audit dengan integritas laporan keuangan, keberadaan komite audit dianggap kurang efektif terkait dalam peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris audit tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian Putra, 2012 tentang Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*,

Kualitas Audit dan Manajemen Laba Terhadap Integritas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Pada tahun 2008 sampai 2010. Sampel diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*. Data penelitian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan independensi, komite audit, kualitas audit dan manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Menurut Jama'an, 2013 penelitian tentang Analisis independensi mekanisme *corporate good governance*, Kepemilikan Institusi, Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit dengan menggunakan sampel dan populasi penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian bahwa pengaruh antara mekanisme *corporate good governance* Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit serta Kualitas Kantor Akuntan Publik menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Astria, 2011 meneliti tentang “Pengaruh Audit Tenure, Struktur, *Corporate Good Governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur *good governance*, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan Arleen Herawaty (2007) dengan judul Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *corporate good governance*, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Industri yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2004 – 2006 menyatakan bahwa Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda, yang terdiri dari *Adjusted R Square*, untuk melihat persentase pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel terikat, Uji F untuk menguji hipotesis antara lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen serta Uji t untuk menguji hipotesis antara satu variabel independen dengan satu variabel independen. Penelitian yang sekarang mereplikasi penelitian Arleen Herawaty (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *corporate good governance*, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan” yang menggunakan sampel dan populasi pada perusahaan industri yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2000 - 2003. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan sampel 27 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*. Perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu tahun penelitian, tahun penelitian yang sekarang 2013 - 2016. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul” **Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Good Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Independensi Auditor sebagai variabel**

intervening .”independensi Auditor terhadap integritas laporan keuangan.Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan? Bagaimana pengaruh Kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan? Bagaimana pengaruh independensi Auditor terhadap komisaris independenTujuan Dan Manfaat Penelitian

Theory Agency

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Good Governance*.Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham. Namun disisi lain, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Penyatuan kepentingan seperti ini, seringkali menimbulkan konflik yang dinamakan konflik keagenan . Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2013).Jansen dan Mecking dalam Heni susana (2013) menggambarkan hubungan *agency* sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh:Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap integritas laporan keuangan.Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan.Untuk mengetahui pengaruh independensi Auditor terhadap komisaris independen

wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Berle dan Means (2010) menyatakan bahwa dalam teori agensi yang memiliki saham sepenuhnya adalah pemilik (pemegang saham), dan manajer diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham.Baik *principal* maupun *agent* diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata – mata termotivasi oleh kepentingan pribadi.

Eisendhart dalam Dewi Maharani, 2016, mengemukakan beberapa teori yang melandasi teori agensi. Teori – teori tersebut dibedakan menjadi tiga jenis asumsi yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan dirinya dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.Sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Jadi yang dimaksud dengan teori keagenan yaitu membahas tentang

hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* dan *principal* dalam mencapai kemakmuran yang dikehendakinya disebut sebagai masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan tersebut dapat terjadi akibat adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi ini terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mendapatkan informasi relatif lebih cepat dibanding pihak eksternal, seperti investor dan kreditur. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya (Richardson). Dalam Tika (2013). Menurut Scott dalam Dessy, 2016, informasi asimetri mempunyai dua tipe. Tipe pertama *Adverse selection*. Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Contohnya, adalah kemungkinan konflik yang terjadi antara orang dalam (manajer) dengan orang luar (*investor potensial*). Berbagai cara dapat dilakukan oleh manajer untuk memperoleh informasi lebih dibandingkan investor, misalnya dengan menyembunyikan, menyamarkan, memanipulasi informasi yang diberikan kepada investor. Akibatnya investor tidak yakin terhadap kualitas perusahaan atau membeli saham dengan harga sangat rendah. Tujuan utamanya adalah membantu manajer korporasi untuk mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantaranya keberadaan hubungan

– hubungan dilingkungan perusahaan mereka serta menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas – aktivitas mereka dalam meminimalkan kerugian bagi *stakeholdernya*. Lebih lanjut lagi menurut Helena dan Therese (2005:8) masyarakat merupakan *stakeholder* terpenting bagi perusahaan dan media memegang peranan penting dalam mengkonsumsikan aktivitas – aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*. Media juga memiliki kekuatan untuk membeberkan informasi perusahaan, apabila perusahaan melakukan tindakan yang tidak pantas, maka akan membeberkan keburukan perusahaan tersebut sehingga perusahaan perlu menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* untuk menjaga reputasi dihadapan *stakeholdernya*.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri dan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (El Gammal dan Showeiry (2012)).

Konsep *return theory* menurut Scott (2000) dalam Sigit, 2016 adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian

otorisasai pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham.

Noronha dan Vinten (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontra antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembangan yang lebih besar atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan

kepada manajer untuk melakukan *earnings management* (Kerstein, dan Rai, 2017).

Bukit dan Takiah (2015) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi mas mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut Rina dan Takiah (2009). Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku oportunistik dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan

Auditing dan Akuntan Publik

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2011).

Adapun unsur – unsur dari

Kebijakan dan prosedur dalam melaksanakan supervise atas semua pekerjaan pada jenjang organisasi harus ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi norma pengendalian mutu yang

ditentukan. Luas supervise dan penelaahan yang tepat untuk suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kerumitan masalah yang dihadapi, kualifikasi auditor yang ditugasi, serta tersedia tidaknya dan dimanfaatkan tidaknya tenaga yang dapat memberikan konsultasi. akan diserahkan padanya. Tata cara dalam mempromosikan auditor mempunyai pengaruh besar atas mutu pekerjaan suatu kantor akuntan publik.

Penerimaan dan pemeliharaan hubungan dengan klien Ditepatkan dalam menerima atau memelihara hubungan dengan klien, agar sejauh mungkin dihindarkan terlibatnya nama kantor akuntan tersebut dengan klien yang mempunyai itikad kurang baik.

Inspeksi Ditetapkan agar kantor akuntan publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa prosedur yang ada hubungannya dengan unsur pengendalian mutu lainnya telah ditetapkan secara selektif.

Independensi

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220, menyatakan bahwa independensi berarti tidak mudah dipengaruhi. Auditor secara intelektual harus jujur, bebas dari kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien, baik terhadap manajemen maupun pemilik. Definisi sejenis dikemukakan oleh Nike Rimawati (2011) yang menyatakan bahwa independensi sebagai cara pandang yang tidak memihak didalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Kode etik Akuntan Publik menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Penelitian

mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan berbagai ukuran. Namun dalam penelitian ini independensi auditor diukur melalui: Lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan jasa non audit. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan public berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2005). Menurut Ruchjat Kosasih (2010), ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu:

Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.

Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau merevisi laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi berat sebelah”**Aspek Independensi**

Menurut Taylor dalam Dessy (2015) . Ada dua aspek independensi, yaitu:

1. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
2. Independensi penampilan (*image projected to the public/appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Penelitian ini menguji pengaruh dari independensi terhadap integritas laporan keuangan yang dinyatakan melalui berapa besar *fee* audit yang dibayarkan klien kepada auditor. Jika Kantor Akuntan Publik (KAP) menerima *fee* audit yang tinggi, maka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan menghadapi tekanan ekonomis untuk memberikan opini yang bersih (dalam hal ini wajar tanpa pengecualian) dan dinilai sisi juga dalam rangka mempertahankan klien itu sendiri sehingga tidak berpindah pada Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor lain (Bamber, 2000).

Pada lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat Peraturan nomor VIII.A.2 yang berisi tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Peraturan tersebut diantaranya membatasi hubungan *auditee* dan auditor dalam jangka waktu tertentu, yaitu emiten harus

mengganti kantor akuntan setiap lima tahun dan setiap tiga tahun untuk auditor. Selain itu, pemberian jasa non audit tertentu, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan manajemen, disamping pemberian jasa audit pada seorang klien tidak diperkenankan karena dapat mengganggu independent auditor. Menurut Supriyono (2010) yang dikutip dalam penelitian Mayangsari (2012), ada enam faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, salah satunya adalah jasa-jasa lain selain audit yang dilakukan oleh auditor bagi klien. Seringkali manajemen klien meminta kantor akuntan publik untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. Pemberian jasa lain selain jasa audit menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah akuntan publik tersebut dapat mempertahankan independensinya **Komite Audit**

Komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. Siegel dalam Susiana dan Herawaty(2007) Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Supriyono(2008) Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

1. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
2. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
3. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan

yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.

4. Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Salah satu cara auditor mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit Supriyono(2008). Sesuai dengan fungsi komite audit di atas, sedikit banyak keberadaan komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana auditor dapat melaporkan temuannya dengan baik atau tidak tentang adanya suatu pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan menurut Christiawan dalam Singgih dan Bawono (2010) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang "mau" mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2015) dan merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor. Teoh (1993) dalam Fany (2013) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earnings, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient*(ERC). Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokan auditor *big four* dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*.

Integritas Laporan Keuangan

Mulyadi (2014) mendefinisikan integritas sebagai berikut “ integritas adalah prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.”

Dalam penelitian Mayangsari (2013) integritas laporan keuangan didefinisikan sebagai berikut” Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur”

Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba. **Komisaris Independen**

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah : “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan Memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1(satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, disamping itu Anggaran Dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris

utusan. Komisaris Independen, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UUPT, Komisaris Independen telah diadopsi yakni pada Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan :

- a. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- b. Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 120 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa :
 ”Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah Komisaris dari pihak luar.”
 Istilah independen pada komisaris independen maupun direksi independen bukan menunjukkan bahwa komisaris atau direksi lainnya tidak independen. Istilah komisaris independen ataupun direksi independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. (Indra Surya, Ivan Yutiavandana, 2006)

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan

direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Jadi Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Karena tidak ada hubungan seperti itu, maka komisaris independen ini diharapkan dapat bertindak objektif dan dapat melihat persoalan perseroan mensyaratkan adanya komisaris independen ini, misalnya untuk perseroan terbatas terbuka.

Kriteria Komisaris Independen diambil oleh FCGI dan kriteria otoritas bursa efek Australia tentang Outside Directors. Kriteria untuk Outside Directors dalam One Tier System tersebut telah diterjemahkan menjadi kriteria untuk Komisaris Independen dalam position paper FCGI kepada NCCG. Kriteria tentang Komisaris Independen tersebut adalah sebagai berikut :
 :Seharusnya ada definisi yang jelas tentang komisaris ”ekstern” atau komisaris ”independen”.

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen;
2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang

- saham mayoritas dari perusahaan;
3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu;
 4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut;
 5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut;
 6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut;
 7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

Komisaris Independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen,

pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : "Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan".

Pertimbangan independen pada kata Komisaris Independen adalah cara pandang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan. (Retno Murdingsih, 2012).

Pengaturan mengenai Komisaris Independen juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan lainnya yakni : Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 dalam Pasal 10 mengenai komposisi komisaris, dimana di dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan

bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas harus berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan yang bebas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
- b. tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- c. tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau terafiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- d. tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya;

Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Myers (2003) menyatakan bahwa semakin lamanya hubungan relasi antara KAP-klien dapat mempunyai pengaruh yang merugikan pada independensi KAP karena obyektifitas KA pada klien akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dugaan rusaknya independensi

- e. bebas dari kepentingan aktifitas bisnis atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berfikir secara bebas di lingkup BUMN.

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan Komisaris Independen juga telah diatur dalam Peraturan Bursa Efek Jakarta Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. auditor disebabkan karena masa kerja auditor dan klien menyebabkan pada beberapa negara, termasuk Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan rotasi yang sifatnya *mandatory* (Astria, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

:Terdapat pengaruh positif dari independensi seorang auditor terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang

independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dapat disimpulkan keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011). Kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajerial berperan dalam membatsi perilaku penyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan. Dengan demikian manajer, pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memiliki perusahaan, mengambil keputusan yang terbaik untuk

kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang lebih tinggi (Astria, 2011)

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gideon dalam penelitian (Astria, 2011) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H2.3 :Terdapat pengaruh dari kepemilikan Institusional terhadap integritas laporan keuangan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Dengan

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan *big five* dan *non big five* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003). (Teoh, 1993) berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earnings, yang diukur dengan *Earnings Response Coefficient* (ERC). Penelitian kali ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokan auditor *big four* dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran

demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Astria, 2011). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut : **H2.4: Terdapat pengaruh dari komite audit terhadap integritas laporan keuangan.**

perusahaan KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2007) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan KAP yang lebih kecil

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh dari kualitas audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Variabel Intervening

Variabel intervening merupakan variabel penyela yang terletak di antara variabel dependen dan variabel independen (Sugiyono, 2016). Tujuan dari variabel intervening ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antara variabel independen

terhadap variabel dependen. Setelah mengetahui hasil dari pengaruh langsung dari pengaruh tidak langsung, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan apakah variabel intervening dalam penelitian ini dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Integritas laporan Keuangan	informasi yang benar dan jujur Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan Mayangsari dalam Susiana dan Herawaty, 2013.	$C_{it} = (RP_{res\ it} + DEPR_{res\ it}) / NOA_{it}$
2.	Independensi	pemberian jasa non audit tertentu, seperti menjadi konsultan pajak, konsultan manajemen, disamping pemberian jasa audit pada seorang	Independensi diukur dengan menghitung lamanya hubungan KAP menjadi auditor pada perusahaan klien

		klien tidak diperkenankan karena dapat mengganggu independensi auditor	
3.	<i>Mekanisme Good Corporate Governance</i>	Peraturan No. 1-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa huruf C-1, dimana dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan yang baik	1. Komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga persen) dari jumlah seluruh komisaris. 2. Komite Audit. 3. Sekretaris perusahaan.
4.	Kualitas audit	KAP <i>big Four</i> dan 0 jika ternyata perusahaan diaudit oleh KAP <i>non big four</i>	<i>dummy</i> dimana angka 1 diberikan jika auditor yang mengaudit perusahaan merupakan auditor dari KAP <i>big Four</i> dan 0 jika ternyata perusahaan diaudit oleh KAP <i>non big four</i>
No	Variabel	Definisi	Pengukuran
5.	Komisaris Independen	Nama komisaris, tugas dewan komisaris.	Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi.

Sumber : Penelitian Terdahulu

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang-orang, peristiwa dan hal-hal yang menjadi obyek penelitian yang memiliki standar-standar tertentu dari ciri-ciri yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sekaran, 2000) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Perbankan yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 sampai 2013, berjumlah 105 dengan tujuan mengetahui trend perkembangan integritas laporan keuangan pada tahun terbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dikarenakan sampel pada Perbankan sudah mempunyai

kriteria yang ditentukan Bursa Efek Indonesia sehingga dipergunakan semua untuk penelitian. Jumlah sampel penelitian 35 perusahaan bank dengan Kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur selama periode 1
2. Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013.
3. Telah membentuk komite audit atau komisaris independen sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak memiliki kepemilikan manajerial, tidak melakukan pengumuman laba,

merger, akuisisi dan diversifikasi selama lima hari sebelum dan sesudah periode pengumuman pembentukan komite audit.

4. Data harga saham dari IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) tersedia selama periode estimasi dan pengamatan, dan saham perusahaan yang dijadikan sebagai sampel aktif diperdagangkan.

Tabel 3.1
Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur selama periode 1 Januari 2013 as/d 2016	105
Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur selama periode 1 Januari 2013 as/d 2016 yang tidak membentuk komite audit	(40)
Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan manufaktur selama periode 1 Januari 2013 as/d 2016 yang harga saham gabungan tidak tersedia selama periode estimasi	(30)
Jumlah sampel 35 x 4 tahun = 140 sampel penelitian	35

Sumber : Data Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 diolah

Tabel 3.2
Nama – nama sampel Perusahaan Perbankan Pada tahun 2013 – 2016

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO
2	Bank MNC Internasional Tbk	BABP

3	Bank Capital Indonesia Tbk	BACA
4	Bank Central Asia Tbk	BBCA
5	Bank Bukopin Tbk	BBKP
6	Bank Mestika Dharma Tbk	BBMD
7	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
8	Bank Nusantara Parahyangan Tbk	BBNP
9	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
10	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
11	Bank JTrust Indonesia Tbk	BCIC
12	Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN
13	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	BEKS
14	BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	BJBR
15	BPD Jawa Timur Tbk	BJTM
16	Bank QNB Indonesia Tbk	BKSW
17	Bank Maspion Indonesia Tbk	BMAS
18	Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
19	Bank Bumi Arta Tbk	BNBA
20	Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA
21	Bank Maybank Indonesia Tbk	BNII
22	Bank Permata	BNLI
23	Bank Sinarmas Tbk	BSIM
24	Bank of India Indonesia Tbk	BSWD
26	Bank Victoria International Tbk	BVIC
27	Bank Artha Graha Internasional Tbk	INPC
28	Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA
29	Bank Windu Kentjana International Tbk	MCOR
30	Bank Mega Tbk	MEGA
31	Bank Mitraniaga Tbk	NAGA
32	Bank OCBC NISP Tbk	NISP
33	Bank Nationalnobu Tbk	NOBU
34	Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
35	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	SDRA

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain (Umar, 2001:69). Data

penelitian ini meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai dengan 2013.

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan

dokumentasi yaitu dengan cara mencari data langsung dari catatan – catatan atau laporan Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Data penelitian ini meliputi laporan keuangan yang telah dipublikasikan selama tahun 2009– 2013.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS versi 20.0.

Pengujian Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik sampel yang digunakan dan menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif meliputi jumlah, sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar devias

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUES). Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari pengujian tersebut adlah Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat analisis grafik normal *probability plot* dan uji statistik. Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik Ghozali(2009). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati secara visual terlihat normal. Sebaiknya analisis grafik dilengkapi dengan uji statistik, yaitu nilai kurtosis dan Skewness (kemecengan) dari residual Nilai Z Statistik dari Skewness dapat dihitung dengan rumus (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2007). Multikolonieritas terjadi dalam analisis regresi logistik apabila antar variabel independen saling berkorelasi. Dalam Ghazali (2006) mutikolonieritas dapat dilihat dari :

Nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF)

Hasil dari pengujian ini dapat dilihat dari nilai VIF menggunakan persamaan $VIF = 1 / tolerance$. Jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinearitas

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada Periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian menggunakan model *Durbin Watson* (DW-Test) Hipotesis yang akan diuji adalah :

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *Homoskedastisitas*, dan jika berbeda disebut *Heteroskedastisitas*. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel (ZPRED) dengan nilai residualnya SREID. Model regresi yang baik jika *variance* dari residual satu ke residual yang lain. F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji *Anova*, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (H_0 ditolak H_a diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada *Anova* (Olahan dengan *SPSS*, Gunakan Uji Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan audit).

berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.

Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 ,) secara sendiri atau masing-masing terhadap variabel dependen Y Ghazali, (2007: 84- 85). Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter(β_i) sama dengan nol atau $H_0 : \beta_i = 0$ Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: $H_a : \beta_i \neq 0$ Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

-Jika t hitung < t tabel maka H_0 ditolak

-Jika t hitung > t tabel maka H_0 diterima

Untuk mengukur nilai t tabel, ditentukan tingkat signifikansi 5 persen dengan derajat kebebasan $df = 4$ dengan n adalah jumlah observasi.

Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui keakuratan hubungan antara integritas laporan keuangan (variabel dependen) dengan independensi, mekanisme *Good Corporate Governance* yang diproses dengan Komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, kualitas

Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui kemampuan variabel independen (variabel bebas) dalam menerangkan variabel dependen (variabel tergantung) dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2003). Jika R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu) hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu) maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi tergantung semakin besar. Nilai R^2 ini berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. Model analisis jalur (*path analysis*) SPSS ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung. Supriyono dan Maharani (2013:74-75) menjelaskan langkah-langkah dalam analisis jalur – jalur yaitu sebagai

berikut: Merancang model berdasarkan konsep dan teorema pemeriksaan terhadap asumsi yang mendasari. Asumsi yang mendasari *Path* adalah:

- Hubungan antar variabel bersifat linier dan adaptif
- Hanya model rekursi yang dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem kausal satu arah. Sedangkan model yang mengandung kausal resiprokal tidak dapat dilakukan dengan analisis *path*
- Variabel endogen setidaknya dalam ukuran interval
- Observed variables* diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan reliabel).
- Model yang dianalisis diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep – konsep yang relevan

Analisis Data Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian secara kuantitatif pengaruh variabel independen, mekanisme *good governance*, kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terhadap integritas

laporan keuangan terlebih dahulu akan ditinjau mengenai deskripsi variabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Selengkapnya mengenai hasil statistik

deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Descriptive Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1	140	0	5	1.58	1.013
Y2	140	33	100	58.32	10.350
X1	140	1	4	1.88	.818
X2.1	140	33	100	58.32	10.350
X2.2	140	0	28	.98	3.969
X2.3	140	10	100	74.85	22.463
X2.4	140	3	8	3.96	1.128
X3	140	0	1	.68	.469
Valid N (listwise)	140				

Sumber : data primer diolah, 2018

Pada tabel 4.3 di atas menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.3, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap integritas laporan keuangan (*Constant*) menunjukkan nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 5 dengan rata-rata sebesar 1,58 dan standar deviasi sebesar 1,013 dan Komisaris Independen sebagai variabel intervening menunjukkan nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 100, rata – rata sebesar 58, 32 dan standar deviasi 10,350 Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Independensi (ID) menunjukkan nilai minimum sebesar 1 nilai maksimum sebesar 4 dengan rata-rata sebesar 1,88 dan standar deviasi 0,818. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Variabel Komisaris Independen menunjukkan nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum sebesar 100 dengan rata-rata sebesar 58,32 dan standar deviasi 10,350 .

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Variabel Kepemilikan Manajerial menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 28 dengan rata-rata sebesar 0,98 dan standar deviasi 3,969.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Variabel Kepemilikan Institutional menunjukkan nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 100 dengan rata-rata sebesar 74,85 dan standar deviasi 22,463. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Variabel Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 3 nilai maksimum sebesar 8 dengan rata-rata sebesar 3,96 dan standar deviasi 1128.

Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap Variabel Kualitas Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 0 nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 68 dan standar deviasi 0,469.

Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependennya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model

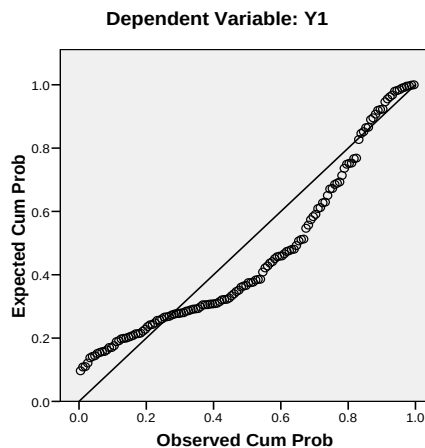
regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik. Berdasarkan hasil pengujian SPSS *Normal Probability Plot* yang terbentuk adalah sebagai berikut

Gambar 4.1

Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghazali (2016) multikolinearitas dapat juga dilihat nilai *Tolerance* dan lawannya *Varian Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah nilai tolerance di atas 0,10 atau sama dengan nilai VIF di bawah 10 . Setiap analisa harus menemukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolelir.

Tabel 4.5

Hasil Multikolinearitas

Model	Collineariry Statistics
-------	-------------------------

	Tolerance	VIF
X1 (ID)	0,972	1,028
X2.1 (KI)	0,912	1,097
X2.2 (MANJ)	0,846	1,182
X2.3 (INST)	0,829	1,206
X2.4 (KM)	0,955	1,047
X3 (KA)	0,927	1,079

a. Dependent Variabel :Y

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Hasil Analisa diatas terlihat untuk kelima variabel independen, angka VIF Lebih dari 0,10 dan nilai *tolerance* diatas 0,60 . Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas. Maka model yang ada layak untuk dipakai.**Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan autokorelasi yang terjadi antara residual pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W.

Tabel 4.6

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.260 ^a	.067	.025	1.00003	2.313

a. Predictors: (Constant), X3, X2.1, X1, X2.4, X2.2, X2.3

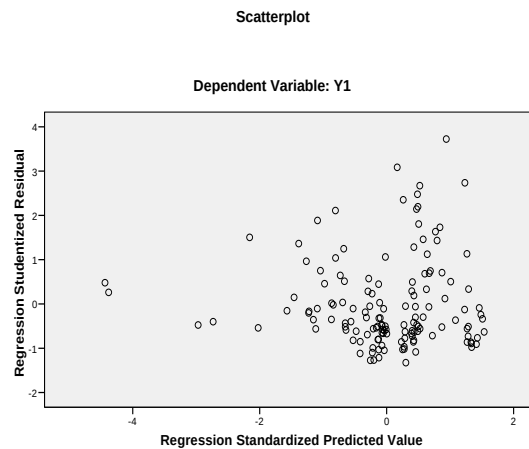
b. Dependent Variable: Y1

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali

(2016) cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitasnya dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi dan sumbu X residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di standardized.

Gambar 4.2



Step I Tabel 4.9
Hasil Regresi Linear Berganda Step II

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.119	1.453		-.082	.935
X1	.273	.207	.113	1.316	.190
X2.1	-.005	.017	-.025	-.282	.778
X2.2	-.074	.046	-.148	-1.612	.109
X2.3	-.008	.008	-.088	-.948	.345
X2.4	-.187	.152	-.107	-1.231	.221
X3	-.031	.370	-.007	-.085	.933

a. Dependent Variable: LnUt2_1

Sumber : data primer diolah tahun 2018

$$Y2 = - 0,119 + 0,273X1 - 0,005X2.1 - 0,074 X2.2 - 0,008 X2.3 - 0,187X2.2 - 0,031$$

Dari hasil persamaan regresi berganda Step II diinterpretasikan sebagai berikut:

Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah $- 0,119$, hal ini berarti bahwa Y2 (Komisaris Independen)

akan bernilai 2,563 Jika Idependensi, komisaris Independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institutional, Komite Audit dan kualitas audit, bernilai 0. Nilai itu berarti integritas laporan keuangan tidak akan terjadi jika tidak dipengaruhi Idependensi, komisaris

Independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan Institutional, Komite Audit dan kualitas audit

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel (ID, KI, ,MANJ, INST,KM dan KA)